

RUTE INDONESIA RAYA

Abdy Yuhana

Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI

Korespondensi : abdy.yuhana@gmail.com

Submitted

: 13 Agustus 2024

Published

: 16 Agustus 2024

Pendahuluan

Perkembangan global yang begitu pesat kemajunya. Negara-negara di dunia berlomba dengan memperlihatkan keunggulannya di berbagai bidang. Dalam konteks perkembangan global tersebut, yang menarik adalah persaingan, terutama di bidang ekonomi antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Amerika Serikat (AS). Kedua negara tersebut berebut pengaruh dalam konstelasi negara-negara dunia. RRC memiliki konsep Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Roads Initiative (BRI) yang merupakan pengembangan dari Prakarsa Satu Sabuk Satu Jalan atau one belt one road initiatives (OBOR). Dengan konsep ini, mereka ingin menghidupkan kembali jalur sutra dengan memanfaatkan jalur perdagangan dan budaya di sepanjang Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa dan Timur Tengah yang pernah dibangun pada masa Dinasti Han abad ke-200 Sebelum Masehi.

Sementara itu, pasca bubarnya Uni Soviet, sebagai negara adidaya, AS terus ingin memperlihatkan supremasinya di dunia. Pada saat perang dingin pun, melalui program bantuan yang sudah berjalan seperti Marshall Plan, dan dengan program itu menjadi 'the invisible hand', AS memiliki kendali terhadap negara lain. Negara-negara lain pun terus berbenah untuk meningkatkan daya saing mereka dalam konteks agar tidak tertinggal dalam peta persaingan global, terutama perang dagang. Mereka tidak ingin posisi mereka hanya sebagai penonton. AS dan RRC sangat terlihat dalam mempertontonkan perang dagang tersebut, yang banyak dikatakan seperti perang dingin antara AS dan Uni Soviet (sebelum bubar), dan yang menjadi sasarannya adalah di wilayah Asia Pasifik dan Afrika. Sementara itu, negara-negara Eropa tidak mau terlibat persaingan dengan kedua negara tersebut, dengan melepaskan diri dari dua kekuatan negara tersebut, dan memosisikan sebagai kekuatan ekonomi tersendiri.

Melihat situasi geopolitik internasional tersebut sesungguhnya posisi Indonesia dipastikan menjadi sasaran perang dagang kedua negara yang sedang bersaing yaitu. Apalagi, dengan geopolitik yang dimiliki Indonesia, dapat dipastikan Indonesia akan terus menjadi negara yang menjadi pilihan. Hal itu disebabkan, pertama, Indonesia merupakan pasar potensial; kedua, sebagai penghasil bahan baku perdagangan; dan ketiga, memiliki posisi yang strategis sebagai jalur logistik perdagangan internasional, yang melewati wilayah perairan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, sebanyak 90 persen perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40 persennya melewati laut Indonesia.

Dalam situasi yang begitu terang benderang dalam konteks posisi Indonesia, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh semua komponen bangsa? Melihat data yang disampaikan, sesungguhnya Indonesia masih dalam posisi mengejar kemajuan yang dicapai negara lain. Sebagai contoh, catatan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menunjukkan, dalam hal daya saing, laporan terakhir Indeks Daya Saing Global tahun 2019 menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-50, sementara negara tetangga kita Malaysia dan Thailand berada di posisi ke-27 dan ke-40. Yang lebih mengagetkan, Singapura berada di peringkat pertama. Hal ini berhubungan dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan investasi.

Kemudian, dalam hal inovasi menurut Indeks Inovasi Global tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 131 negara. Malaysia di peringkat ke-33, Vietnam ke-42 dan Thailand di urutan

ke-44. Artinya, dalam lingkup dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih belum beranjak. Mencermati daya saing dan inovasi yang telah dirilis tersebut, hal itu merupakan bukti bahwa dunia global telah memetakan secara rasional tentang indeks kemajuan suatu negara. Itulah sebabnya, sesungguhnya Indonesia harus terus berbenah, terutama dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Meskipun dalam konstitusi dicantumkan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal itu belum menjamin akan terciptanya manusia Indonesia unggul yang berkarakter jika tidak dibarengi faktor lain, seperti pembangunan karakter berperadaban nusantara dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Masalah mendesak terkait kesehatan adalah tentang stunting (gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi), wasting (kekurangan gizi sehingga membuat badan menjadi kurus), dan obesitas (kegemukan). Dua hal itulah yang menopang dan menjadi dasar bagi kemajuan suatu bangsa. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), negara-negara yang maju secara pesat karena mengandalkan SDM adalah RRC, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong. Padahal, jika saja SDM di Indonesia unggul dengan ditopang Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pengaruh besar dalam kancah persaingan global.

Oleh karenanya itu, untuk mencapai ke arah kemajuan negara saat ini, Indonesia membutuhkan rute, arah yang dilalui, secara tepat sehingga tidak salah arah, salah jalan dan salah mencapai tujuan dalam bernegara. Terlalu mubazir jika melihat dari sisi geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi, Indonesia tidak memiliki kekurangan, bahkan yang kita miliki hampir sempurna dan ada di Nusantara. Akan tetapi, melihat hari ini, bangsa ini masih disibukkan oleh belum selesainya masalah faktor sejarah, berdebat mengenai kesepakatan bernegara, dan masih dalam suasana euforia demokrasi. Maka, sepanjang ketiga hal tersebut belum diselesaikan secara dewasa, duduk bersama dengan menghargai semua perbedaan yang ada, janganlah berekspektasi terlalu tinggi untuk menjadi negara yang bisa menepati janji kemerdekaan Indonesia, yaitu sejahtera, adil, makmur, aman dan sentosa.

Mengapa rute dalam bernegara saat ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, secara sederhana bisa diilustrasikan, dalam satu perjalanan menuju ke tempat tujuan, yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah bagaimana memahami rutanya supaya dengan tepat waktu bisa sampai di tempat tujuan. Jadi, jangan sampai hanya bermodalkan keberanian, kemudian asal berjalan dengan kondisi tidak memahami rutanya, dipastikan perjalanan tersebut tidak akan mencapai tujuan, sebelum tahu rutanya! Begitupun Indonesia. Sebagai sebuah negara yang dalam proses menepati janji kemerdekaannya, Indonesia harus memiliki rute.

Pertanyaannya, darimana memulainya?

Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan, yaitu pertama, kesadaran akan potensi dan keadaan wilayah yang dimiliki Indonesia; kedua, kesepakatan dalam bernegara sebagai acuan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa; dan ketiga, sinergi dalam pembangunan bangsa, yaitu pembangunan peradaban bangsa, pembangunan SDM unggul, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Itulah rute bagi Indonesia yang saat ini belum dilalui dengan baik. Jadi bagi Indonesia, menjadi negara besar dan maju, dengan daya saing yang tinggi dan diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan global negara di dunia, adalah sebuah keniscayaan yang akan menemui kenyataannya, karena kondisi obyektifnya terpenuhi dari potensi yang dimiliki. Meskipun demikian, yang terjadi bisa menjadi sebaliknya jika tidak ada kesadaran bersama dari semua komponen bangsa tentang pemahaman yang kongruen, sebangun tentang pentingnya rute, arah dalam bernegara.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan kritis yang muncul sebagai identifikasi masalah dalam artikel ini. Pertama, bagaimana langkah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk dapat menjapai cita-cita kemerdekaannya? Melalui artikel ini, penulis berupaya menyediakan analisis mendalam mengenai kedua pertanyaan tersebut dalam konteks pentingnya Rute Indonesia Raya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normative dan analisis kualitatif. Sebagaimana yang diuraikan oleh Soekanto, Soerjono, dan Mamudji (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015). Metode ini dirancang untuk memfasilitasi penelitian yang komprehensif terhadap

peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli. Dengan fokus pada dinamika hukum yang berkaitan dengan Rute Indonesia Raya. Dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, penelitian ini mengandalkan studi dokumentasi, yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta literature hukum lainnya. Data primer dalam penelitian ini merupakan data sekunder atau data kepustakaan, yang menjadikan studi kepustakaan sebagai tahapan krusial dalam pengumpulan data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghimpun data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Pendekatan yang diterapkan melibatkan serangkaian proses yang sistematis, mulai dari pengumpulan, pemahaman, hingga analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif yang mendalam mengenai subjek yang diteliti, yakni Rute Indonesia Raya.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Akan Potensi dan Keadaan Wilayah yang Dimiliki Indonesia

Indonesia hanyalah sebuah noktah kecil di muka bumi, tetapi merupakan bagian penting planet ini. Secara geopolitik, seperti pernah dikatakan Bung Karno, Indonesia adalah suatu archipelago. Negara kepulauan terbesar di dunia, yang membujur titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudra dengan daya tarik kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, sejak lama menjadi titik temu penjelajah bahari yang membawa proses penyerbukan silang budaya dari pelbagai arus peradaban dunia." Sebuah negeri yang mahaindah dalam "untaian zamrud khatulistiwa" yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya, di sepanjang rangkaian tanah air. Maka, jadilah Nusantara sebagai tamansari peradaban.'

Bung Karno memahami betul posisi geopolitik Indonesia. Karena itu, secara gamblang ia mengatakan, "Geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan *geografische constellatie* suatu negeri." Sebagai wilayah kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, Nusantara mempunyai beberapa kondisi objektif sebagai berikut. Pertama, sebagai negara kepulauan; kedua, terletak di antara dua benua dan dua samudra; ketiga, sumber kekayaan alam yang berlimpah; keempat, pluralis sukunya; dan kelima, kultur bangsa yang beragam ini berinduk pada unsur-unsur asli Indonesia. Kelima unsur objektif ini selanjutnya akan kita pergunakan sebagai alat untuk menyusun pertahanan nasional. Pertahanan nasional akan benar-benar kuat jika berdiri di atas karakteristik bangsa Indonesia, tanah air sendiri. "Oleh karena itu, ketahuilah, ketahuilah kondisi tanah air kita, geopolitik kita. Pancasila adalah hasil daripada pengetahuan geopolitik."

Pancasila yang Bung Karno gali merupakan hasil dari penggalian pengetahuan akan konsep geopolitik Indonesia. Dalam pidato kelahiran Pancasila 1 Juni, Bung Karno menyatakan, "Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatra saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan di antara dua benua dan dua samudra, itulah tanah air kita!" Bumi Nusantara dikenal sebagai zamrud khatulistiwa karena adanya hamparan pulau-pulau dengan hutan yang rimbun di tengah lautan yang membiru. Selain mengenai kekayaan alamnya, ada juga dokumen-dokumen sejarah yang menyatakan bahwa ada keyakinan di bumi Nusantara akan lahir banyak orang suci sebagaimana tertuang dalam hikayat-hikayat Raja-raja Pasai.

Potensi kekayaan yang disertai keyakinan yang penuh misteri tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi Nusantara. Daya magnet bumi Nusantara ini ternyata bukanlah sebuah dongeng belaka karena terbukti dari riwayat Nusantara yang kerap dikunjungi oleh bangsa-bangsa asing untuk kemudian diperebutkan dalam waktu lebih dari dua milenium ke belakang. Bahkan, seorang ahli genetika, Stephen Oppenheimer, menyampaikan sebuah dugaan bahwa dongeng atas kepulauan Atlantis yang hilang merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di bumi Nusantara." Pembentukan watak bangsa Indonesia tidak mungkin kita lepaskan pembahasannya dari kenyataan geografis di mana bangsa Indonesia tinggal. Bumi Nusantara terletak di dalam suatu wilayah yang memiliki iklim tropis

yang stabil serta terdiri atas belasan ribu pulau besar dan kecil. Dengan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, keanekaragaman hayati yang berkembang di setiap pulau menjadi lebih jelas.

Karena posisi geografis yang sangat strategis dalam perspektif pertahanan wilayah kepulauan Nusantara, perlu diperhatikan dengan saksama segenap ancaman, tantangan, dan peluangnya. Batas negara adalah batas hak dan kedaulatan terhadap teritori tertentu yang dipisahkan secara geografis, dengan segala yang ada di permukaan, di dalam dan di atas permukaannya. Di atas permukaan akan membatasi seluruh habitat yang ada di atas permukaan bumi, termasuk penduduk dengan etnisitasnya, hubungan sosial dan kekerabatannya, flora dan fauna, sumber daya yang ada, serta berbagai aktivitas di atasnya. Batas negara sebagaimana kita ketahui sekarang ini semakin menjadi tidak jelas mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi. Namun, niat atau usaha untuk menguasai sumber daya, baik alam maupun manusia, adalah tetap menjadi ancaman konkret yang akan selalu kita hadapi.

Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis dengan segala macam kekayaan yang terkandung di dalamnya, seperti yang telah dijelaskan di atas, tentu saja menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) dan kekuatan posisi (*bargaining position*) yang strategis dalam konstelasi hubungan antarbangsa. Bangsa Indonesia mesti sadar akan hal ini sehingga mampu menyusun strategi dan langkah yang efektif guna menghadapi gempuran dari pihak-pihak asing tersebut, akibat menjadi takdirnya, Indonesia berada pada posisi strategis di Asia Pasifik.

Kesepakatan Dalam Bernegara Sebagai Acuan Kehidupan Masyarakat dan Bernegara

Negara demokratis di belahan dunia mana pun pasti mempunyai konsensus atau kesepakatan sebagai urgensi dalam penyelenggaraan negaranya, yang kemudian kesepakatan itu harus diterima sebagai acuan secara kolektif. Termasuk juga di negara kita Indonesia, para bapak bangsa sudah menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara, yang merupakan kesepakatan bernegara dalam hal penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Kehidupan masyarakat dibutuhkan relasi yang kuat dengan sikap toleran terhadap segala perbedaan yang ada di masyarakat dan harus dikelola sebagai modal sosial bagi bangsa Indonesia. Dalam hal berbangsa, Pancasila menghendaki bahwa keindonesiaan yang sudah diikatkan menjadi semakin kokoh dan dalam konteks bernegara segala aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan harus bersumber pada konstitusi, yaitu UUD 1945 yang juga di dalam pembukaannya termuat sila-sila Pancasila dalam alinea keempat.

Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa tentunya tidak hadir begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang mendalam bahkan melalui perdebatan panjang dalam hal keberadaannya. Dimulai dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI yang kemudian diakui sebagai hari lahirnya Pancasila dan dalam satu tarikan napas yang tidak terpisahkan, yaitu dengan hasil rumusan Panitia Sembilan, yaitu Piagam Jakarta, pada 22 Juni dan kemudian disepakati oleh semua komponen bangsa yang berbeda suku bangsa, agama, dan ras, saat ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada 18 Agustus 1945, yang di dalam pembukaannya tercantum sila-sila Pancasila. Dengan demikian, ketiga peristiwa tersebut tidak bisa dipisahkan atau terpenggal satu sama lain. Pancasila hadir menjadi kohesivitas atas pertanyaan tentang apa *staat ide* (dasar negara) yang cocok bagi bangsa Indonesia sebagaimana pertanyaan Radjiman Wediodiningrat, Ketua BPUPKI.

Soekarno, dalam pidato 1 Juni, menghendaki *staat ide* Republik Indonesia adalah sebuah negara yang dilandasi oleh nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Nasionalisme atau kebangsaan dilandasi oleh semangat adanya persatuan nasional, karena dilihat dari akar sejarah bangsa dan realitas keindonesian yang begitu majemuk dan heterogen. Demokrasi adalah preferensiyang tepat dalam sistem bernegara Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pihak tertinggi dan tidak ada pihak lain yang dimintai pendapatnya selain rakyat. Adapun dalam hal ketuhanan, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki agama dan memercayai Tuhan. Dengan demikian, jika dilihat dari tiga aspek tersebut, Pancasila memiliki relasi yang kuat antara individu dan individu, individu dengan negara, dan individu dengan Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta.

Tiga relasi yang dibutuhkan tersebut kemudian tentunya memerlukan peran negara untuk mengatur sehingga kehadiran negara dirasakan ada oleh warga bangsa Indonesia. Dalam hal hubungan individu dengan individu, konsep silih asah, silih asih, dan silih asuh menjadi hal yang relevan dalam konteks kekinian untuk menjaga harmoni sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini, yang tampaknya

semakin menjauh dari spirit tersebut. Konsep hubungan individu dengan negara yang sudah diakomodasi dalam UUD 1945 menjadi hal yang perlu diingatkan lagi karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disepakati konstitusi sebagai acuan, bukan yang lain. Hal ini sejalan dengan konsep negara demokrasi konstitusional, yaitu adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.

Hal menarik disampaikan oleh Moh. Hatta dalam kaitannya dengan penentuan *staat ide* bagi bangsa Indonesia. Katanya, kalau negara ini didasarkan pada agama, maka hanya berlaku bagi satu agama. Oleh karena itu, Hatta setuju dengan konsep negara kebangsaan yang di dalamnya mengakomodasi semua agama yang ada, karena melihat realitas religioitas yang ada di Nusantara, yang kemudian dipertajam oleh Soekarno yang menyatakan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi setiap orang Indonesia hendaknyalah bertuhan, Tuhannya sendiri sesuai dengan agamanya. Maka, menjadi jelaslah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud dalam Pancasila, yakni negara Indonesia memercayai adanya Tuhan dan setiap warganya memiliki agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan tentunya negara perlu menjaminnya dengan memberikan kepastian rasa aman.

Di tengah arus globalisasi yang memperlihatkan kecenderungan adanya dua ideologi yang tengah menguat dalam konteks internasionalisme, yaitu liberalisme dan radikalisme agama, bangsa Indonesia perlu untuk keluar dari dominasi dua ideologi tersebut dan tentunya adalah kebutuhan akan kokohnya Pancasila sebagai ideologi negara. Liberalisme yang mengagungkan paham individu menghendaki adanya kebebasan yang tak terbatas dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah negara sehingga peran negara menjadi sedikit. Jika dipraktikkan dengan demokrasi mayoritas dalam konteks Indonesia, selain tidak sesuai dengan budaya gotong royong, paham tersebut sejatinya sudah ditinggalkan oleh negar-negara di dunia. Hal itu, misalnya, diungkapkan oleh Arend Lijphart, yang mengatakan banyak pemerintahan demokratis yang mengarusutamakan konsensus. Hal ini sudah sejalan dengan Pancasila yang mengambil jalan musyawarah mufakat sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Menerapkan paham agama, bagi Indonesia, sesungguhnya adalah hal yang sudah usang karena sama saja dengan membuka perdebatan lama dan akan menguras energi bangsa yang tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Hal itu, lagi-lagi, sesungguhnya tidak cocok dengan realitas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Paham primordialisme, identitas harus kita resapi bersama bahwa kita tidak bisa menampik dan menjadi keniscayaan atas segala perbedaan yang merupakan rahmat dari Allah SWT. Maka, visi negara Pancasila merupakan cara pandang kita dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwa tidak ada *staat ide* (konsep negara) lain yang tepat bagi bangsa Indonesia yang secara rasional dapat memperkokoh persatuan, keutuhan, dan kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selain lima dasar yang ada di dalam Pancasila yang harus dipedomani dan dipraktikkan secara sadar.

Sinergi Dalam Berbangsa dan Bernegara

Membangun Peradaban Bangsa

Sebagai negara di kawasan tropis, yang letak geografisnya strategis di titik persilangan antara dua benua dan antara dua Samudera, Indonesia menjadi pelintasan budaya dan peradaban dunia. Dalam pandangan Stephen Oppenheimer, konsentrasi manusia prasejarah dalam lingkungan geografi, klimatologi, dan kekayaan alam Nusantara yang berlimpah memberi alasan mengapa Nusantara (khususnya dataran Sunda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari daratan Asia Tenggara) menjadi pelopor cikal bakal peradaban di muka bumi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bung Karno berpendapat bahwa kebudayaan yang pernah ada di Indonesia tergolong kebudayaan purba. Peradaban bangsa ini menemukan momentum terpentingnya ketika kejayaan Nusantara menjelma dalam kehadiran dua imperium besar sebagaimana dikemukakan Bung Karno. Sejak abad ke-9, ketika dikenal sebagai kerajaan Sriwijaya, sampai abad ke-14, ketika menjadi kerajaan Majapahit, negeri ini dikenal kemakmurannya, yang mencapai tingkat ilmu yang demikian tinggi sehingga menjadi sumber pengetahuan bagi seluruh dunia beradab.

Di bawah kedua imperium ini, bentangan luas dari kepulauan Nusantara (terutama wilayah disekitar perairan) pernah diintegrasikan ke dalam suatu kesatuan wilayah negara. Sriwijaya

menguasai sebagian besar Jawa, Sumatera, hampir seluruh semenanjung Malaka dan sekitarnya. Sejak abad ke-7, kerajaan Sriwijaya telah mejadi kekuatan dagang dan budaya yang mengagumkan. Walaupun bahasa Sansakerta digunakan di kerajaan ini, bahasa yang umum dipakai di kejaranaan yang luas ini adalah bahasa Melayu. (Mulyana, 2008) Salah satu warisan Sriwijaya yang dinilai yang paling penting adalah konsolidasi suatu zona berjangkauan besar yang penduduknya berbahasa Melayu di kedua sisi Selat Malaka. Selepas Sriwijaya, giliran kerajaan Majapahit yang menguasai sebagian besar (wilayah pantai) Nusantara, bahkan meluas kearah Barat hingga bagian tertentu di Vietnam Selatan dan kearah Timur sampai di bagian Barat Papua. Kebesaran Sriwijaya ini sepadan dengan imperium lain, yakni Kekhalifahan Islam Abasiyyah di Bagdad dan Dinasti Tang di Cina yang sezaman dengannya.

Majapahit melanjutkan kejayaan Nusantara sebagai kekuatan bahari dengan memanfaatkan jejak-jejak yang diwariskan oleh Sriwijaya dengan kebesaran yang hampir sama, meskipun cakupan wilayahnya berbeda. Menurut Kitab Nagarakertagama, Majapahit memiliki pengaruh luas yang mencangkup hampir seluruh Kepulauan Nusantara saat ini ditambah Singapura, Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. (Koentjaraningrat, 1971) Kapal dagang kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini berlayar sampai ke Cina, Champa (sekarang Vietnam), India dan Jepang. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana) dari reruntuhan Kerajaan Singasari. Majapahit mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dibantu Mahapatih Gajah Mada. Dipuncak kejayaannya, Majapahit berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Rakyat di kerajaan ini menganut agama yang berbeda-beda (Hindu, Buddha, ataupun kepercayaan asli nenek moyang). Beraneka ragam pula suku dan bahasanya. Meskipun demikian, mereka hidup rukun dan damai, seperti semboyan yang mereka amalkan "Mitreka Satata", yang berarti persaudaraan yang satu dengan dasar persamaan derajat.

Ditempa oleh alam kepulauan yang dikepung lautan, nenek moyang bangsa ini sudah terbiasa menganguri air, dan merespon tantangannya dengan keahlian berlayarnya. Bermula antar pulau hingga kemudian berkembang jauh menuju samudera. Sejalan dengan itu, Robert Dick-Read meyakini bahwa para pelaut dari Nusantara telah melintasi sepertiga bola dunia. Mereka diperkirakan telah menjejakkan kaki di Benua Afrika melalui Madagaskar sejak awal masehi. Para pelaut Nusantara itu telah mengarungi samudera dunia lebih dari 1.500 tahun, mendahului Cheng Ho dan Christopher Columbus. Posisi strategis geografi Nusantara dengan kekayaannya alamnya yang melimpah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelbagai arus peradaban dunia. Bahkan, Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776) menyebut tentang dua penemuan agung yang berdampak besar terhadap sejarah pasar global dan globalisasi. Pertama adalah penemuan jalur ke Nusantara (East Indies) melalui Tanjung Harapan oleh suatu ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias pada 1488. Kedua, penemuan Benua Amerika oleh Columbus yang di sponsori Spanyol pada 1492, yang sesungguhnya juga berniat menemukan Nusantara. Banyak ahli sejarah sependapat dengan Smith, merujuk peristiwa tersebut sebagai titik mangsa dari awal (proto) globalisasi, yang dalam perkembangannya melahirkan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas bangsa-bangsa lain, terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Bung Karno dalam otobiografinya mengisahkan, "Negeri kami masih terkenal di lingkungan internasional ketika Christopher Columbus datang mencari Kepulauan rempah-rempah, gugusan pulau yang sekarang kami sebut Kepulauan Maluku. Seandainya Columbus tidak berlayar mencari jahe, pala, lada dan cengkeh kami, dan juga tidak salah jalan, tentu dia tidak akan menemukan benua Amerika. Ketika jalan laut menuju Hindia akhirnya ditemukan oleh orang, modal asing mengucur ke pantai kami seperti semut mengerumuni tempat gula. Dari Portugis datang Vasco da Gama; dari negeri Belanda Cornelis de Houtman. Ini menandai awal dari "Revolusi Perdagangan" di Eropa. Bangsa-bangsa tidak hanya memperhatikan batas-batas ekonomi, tapi juga melompatinya. Kapitalisme ini tumbuh, sampai ia merasa jenuh terhadap kemungkinan untuk perkembangannya selanjutnya dalam masyarakat mereka sendiri. Barang-barang yang sebelumnya hanya diimpor dari Timur, sekarang juga diekspor ke Timur. Jadi, kawasan Timur menjadi pasar-pasar tambahan untuk komoditas Barat yang berlebih dan kesempatan investasi modal yang tidak lagi bisa ditampung di negara mereka. Untuk menguasai ekonomi di negeri lain, terlebih dahulu negeri itu harus di taklukan. Para pedagang menjadi penakluk, bangsa-bangsa Asia-Afrika dijajah, dan ketamakan membuka era imperialisme.

Nenek moyang bangsa ini telah menorekan tinta emas kegemilangannya dalam peradaban. Memahami sejarah merupakan modal dalam membentuk mental dan identitas bangsa. Cendekiawan Prancis, Gustave Le Bon pada 1895 menuliskan dalam bukunya, *The Crowd: A Study of the Popular Mind*, bahwa banyak ilmuwan sosial melupakan pentingnya faktor *moral forces* dalam pembangunan suatu masyarakat, padahal *moral forces* adalah “*precisely these forces that constitute the true mainspring of history*”. Oleh karena itu, untuk memahami *moral forces* bangsa Indonesia, kita perlu memperdalam pemahaman kita akan sejarah bangsa Indonesia yang kemudian akan membentuk karakter manusianya. Indonesia adalah bangsa yang dipersatukan karna geopolitik dan kenyataan sejarah. Yang mempersatukan Indonesia adalah pengalaman ketertindasan, pengalaman ketidakadilan yang diderita bersama, pengalaman pelbagai kekejaman, pengalaman penghinaan bahwa orang asing menjadi tuan-tuan dan menghisap tenaga kerja rakyat. Dalam pengalaman ketertindasan bersama, rakyat Indonesia mulai menyadari harkat kemanusiaan bersama, harkat manusia Indonesia. Sebagaimana yang diucapkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.

Pendek kata, bangsa Indonesia, *Natie* Indonesia bukan lah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan “*le desir d’être en semble*” di atas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t., tinggal dikesatuannya semua pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!, karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “*le desir d’être ensemble*”, sudah terjadi “*Charakter gemeinschaft*”! *Natie* Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu. satu, sekali lagi satu! Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu *Nationale staat*, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu *nasional staat*! bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Sakssen adalah *nationale staat*, tetapi seluruh Jermanialah satu *nationale staat*. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang diutara dibatasi pengunungan Alpen, adalah *naionale staat*. Bukan benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi *nationale staat*.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka dijamin dahulu, adalah *nationale staat*. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat*, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu, kita tidak mengalami *nationale staat*. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata bahwa, kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu *nationale staat*. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa, tanah Bugis yang merdeka itu bukan *nationale staat*.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, mari kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama; Kebangsaan Indonesia. kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*. Kehendak untuk membentuk suatu *nationale staat* hanya karna bersatu dan persatuan perangai kesamaan nasib saja tidak cukup, melainkan perlu dihubungkan dengan kesatuan geopolitik secara luas. Dengan letaknya yang strategis, dalam titik singgung persilangan budaya dan tamansari peradaban dunia. Sebagaimana Denys Lombard katakan, “Sungguh tak ada satupun tempat di dunia ini – kecuali mungkin Asia Tengah – yang seperti Nusantara, menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan di besar dunia, berdampingan atau lebur jadi satu.” Sifat kebaharian Nusantara pada akhirnya membentuk karakteristik budayanya sendiri.

Letak geografisnya yang strategis memungkinkan masyarakat nusantara ini berinteraksi dan bercampur dengan manusia yang berlatar budaya dan karakteristik yang berbeda. Silang budaya

tersebut membentuk watak bangsa yang sejatinya toleran. Bung Karno sering mengingatkan bahwa bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada nilai-nilai kepribadian dan kemandirian bangsa. Indonesia adalah bangsa yang besar, tetapi sering kali memberi nilai terlalu rendah pada bangsanya alias bermental kecil. Masih belum terbebas dari mentalitas kaum terjajah yang sering mengidap perasaan rendah diri (*minderwaardigheidscomplex*).

Para pendiri bangsa sejatinya menyadari arti penting pembangunan mental karakter, sebagaimana pribahasa Inggris menyebutkan, “*when wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, everything is lost.*” (jika harta kita hilang, maka tidak ada yang hilang. Jika kesehatan kita hilang, maka ada sesuatu yang hilang, tetapi jika karakter kita hilang, maka kita akan kehilangan segala-galanya). Sebab, warisan dari kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme tidak hanya terletak pada kekayaan yang dirampas, tetapi pada pewarisan nilai-nilai penindasan, perbudakan yang tertanam dalam kakarakter –mental bangsa. Penderitaan membuat bangsa Indonesia bersatu dan gagasan persatuan mulai muncul dan menyebar. Persatuan nasional memerlukan apa yang disebut Bung Karno sebagai “identitas nasional”, “kepribadian nasional”, dan “berkepribadian dalam kebudayaan”.

Dalam amanat Presiden pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1957, Bung Karno mengingatkan perlunya bangsa Indonesia untuk memerangi dirinya sendiri, “*zelfoverwinning* atas diri kita sendiri”, sehubungan dengan kecenderungan menurunnya kesadaran nasional kita dan menurunnya kekuatan jiwa nasional kita. Selanjutnya ia ingatkan, “Kelemahan jiwa kita ialah, bahwa kita kurang percaya pada diri kita sendiri sebagai bangsa sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar-negeri, kurang percaya-mempercayai satu sama lain padahal kita ini pada dasarnya ialah rakyat gotong royong. Kurang berjiwa gigih, melainkan terlalu lekas mau enak dan cari gampang saja.” Itu semua karena makin menipisnya rasa “*national dignity* – makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri.”

Untuk bangkit dari keterpurukan, bangsa ini harus kembali ke trayek sejarahnya. Bung Karno mengingatkan bahwa kita sekarang ini berada dalam tingkatan kedua dari revolusi kita, yaitu tingkatan *nation building*, tingkat membina bangsa pada tingkatan pertama revolusi, yakni tingkat kemerdekaan (*liberation*). Semua hal, menurutnya, lebih mudah. “Persoalannya hanya satu: pro atau kontra penjajah – habis perkara! Siapa yang pro penjajah, hantam remuk-redam sama dia! Siapa yang kontra penjajah, hayo peganglah bamboo runcing ini. Hayo panggullah ini senapan. Pembagian kekuatan-kekuatan konstruktif dan destruktif sangat mudah, dan tidak ada komplikasi”. Selain itu, pada masa kemerdekaan, “idealisme melambung tinggi, idealisme menyala-nyala. Rajawali Indonesia pada waktu itu benar-benar menggaruda di sapta angkasa.”

Situasinya amat berbeda pada tingkatan kedua, dalam masa *nation building*. Pada tahap ini, “biasanya idealisme agak luntur, dan ‘ego sentrisme’, ‘aku sentrisme’, biasanya makin tumbuh”. Menurut Bung Karno, “kebebasan yang masih dalam pertumbuhan, selalu membangunkan rasa egosentris. Kebebasan yang belum genap itu selalu bersifat ‘bebas untuk bebas’ – ‘*vrij om vrij te zijn*’. Dan selalu ia berpusat pada kebebasan ego, kebebasan ‘aku’. Selalulah ia membawa pada sikap egosentris.” Untuk bisa keluar dari krisis tersebut Bung Karno menyerukan perlunya revolusi karakter-mental. “Lebih-lebih lagi dalam suatu masa *nation building–nation building* dengan segala godaannya, dan dengan segala aberrasinya, sebagai yang saya uraikan tadi itu – maka suatu revolusi mental adalah mutlak perlu untuk mengatasi segala penyelewengan – lebih perlu dari pada dalam masa sebelum *nation building* itu, yaitu dalam masa *liberation*.”

Dengan mengacu pada uraian bung Karno diatas, menjadi jelas dan dapat dipetakan bahwa pembangunan karakter-mental ini sangat penting bagi bangsa yang hidup di tengah pusaran geopolitik global. Napoleon Bonaparte mengingatkan, dalam pertempuran (persaingan) tiga per-empat faktor kemenangan itu ditentukan oleh kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara keterampilan manusia dan sumber daya material. Dalam perkembangannya, pembangunan yang dijalankan bangsa ini terlalu menekankan pada pembangunan fisik ketimbang pembangunan mental sehingga jauh di relung jiwa bangsa ini masih tertanam mentalitas terjajah. Menjadikan bangsa ini rendah diri, serta mudah mengekor bangsa lain; disaat yang bersamaan pula sulit menghargai sesama bangsanya sendiri. Jika dipahami dengan pemahaman sedemikian, menjadi semakin jelas bahwa sejarah adalah potret kehidupan. Dari sejarah, manusia bisa belajar dan

memahami bahwa sejarah bukan hanya menyangkut urusan masa lampau, melainkan juga berkaitan dengan masa kini dan masa depan.

Salah satu syarat bangsa itu maju adalah Adanya kebanggaan terhadap sejarahnya. Penulis Swedia, Juri Lina dalam bukunya *Architect of Deception – The Concealed History of Freemasonry* sudah mewanti-wanti akan pentingnya arti sejarah bagi sebuah bangsa. Ada bahaya yang mengintai bila suatu bangsa melupakan atau tercerabut dari akar sejarahnya. Ia menyebut ada tiga cara yang dilakukan pihak luar untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. *Pertama*, kaburkan sejarahnya. *Kedua*, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. *Ketiga*, putus hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Sumber Daya Manusia Unggul

Indonesia tidak hanya dianugerahi oleh sumber daya alam (SDA) yang melimpah, juga di anugerahi sumber daya manusia (SDM) yang banyak. Anugerah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah itulah yang menjadi modal dasar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju. Namun, keberlimpahan sumber daya alam dan jumlah populasi yang banyak menjadi peluang dan tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia. Menjadi peluang apa bila kita mampu mengelola potensi sumber daya tersebut dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kehidupan. Sebaliknya, jika potensi tersebut tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, Hal itu akan menjadi bencana untuk kita. Oleh karena itu, keberlimpahan sumber daya alam harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia.

Memiliki SDM yang banyak sesungguhnya adalah potensi dan modal utama kita untuk menjadi bangsa yang besar. Namun, untuk mencapai kebesaran itu, perlu dipersiapkan dengan baik. Kemajuan suatu negara dalam Revolusi Industri 4.0 berhubungan langsung dengan perubahan kurikulum pendidikan dengan peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan perbaikan pengetahuan (*knowledge improvement*) dalam mempersiapkan tenaga kerja (*human capital*) untuk menyambut tantangan dan perubahan besar. Akan terjadi disrupsi berkali-kali dalam pola kehidupan, termasuk jenis-jenis pekerjaan yang menjadi usang dan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru.

Semakin disadari bahwa membangun SDM berkualitas adalah dengan mempersiapkan SDM yang sehat dan unggul sejak janin. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan Riset Kesehatan dasar Kementerian Kesehatan 2018, sebanyak 17,7persen bayi usiadi bawah lima tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi anak Indonesia belum ideal untuk berkembang menjadi SDM unggul. Kekurangan gizi pada anak tidak bisa dianggap remeh, sebagaimana yang dikatakan oleh Prof.dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D., Ia mengatakan, pada seribu hari pertama kehidupan, anak tidak boleh mengalami kekurangan gizi. Masa itu kerap disebut sebagai periode emas, dimana awal kehidupan untuk mencetak perkembangan otak dan pertumbuhan badan akan berdampak jangka panjang. Yang terjadi pada periode ini nantinya akan mempengaruhi prestasi belajar; tidak rentan terkena penyakit tidak menular, seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, dan disabilitas di masa lansia. (Lemhanas, 2023)

Selain permasalahan gizi buruk, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak UNICEF menjelaskan bahwa terdapat tiga masalah gizi di Indonesia yang mengancam masa depan jutaan anak dan remaja. Masalah pertama yang paling serius adalah *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Masalah *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak dua tahun. Anak yang mengalami *stunting* paling umum ditandai dengan tubuh yang lebih pendek daripada anak seusianya. Tidak hanya itu, otak anak ini akan sulit tumbuh dan memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasa.

Stunting merupakan salah satu gizi buruk yang paling disorot oleh pemerintah. *Stunting* merupakan masalah yang paling disorot pemerintah. Berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *stunting* tidak hanya berdampak pada si anak, juga memiliki efek jangka panjang pada pertumbuhan negara. Tidak hanya itu, World Bank Investing pun mencatat, *stunting* dapat menghilangkan 11 persen produk domestik bruto (PDB) dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen. Juga dapat mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan menimbulkan kemiskinan antargenerasi.

Kedua, wasting merupakan kekurangan gizi akut yang disebabkan oleh penurunan berat badan secara drastis atau kegagalan dalam proses menaikkan berat badan. *Wasting* ditandai dengan tubuh anak sangat kurus. *Ketiga*, obesitas pada orang dewasa. Nyatanya, masalah obesitas tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Di Indonesia, orang yang memiliki masalah gizi juga ditandai dengan kegemukan atau obesitas. UNICEF menyebut angka kegemukan atau obesitas di Indonesia selama 15 tahun terakhir sudah hampir naik dua kali lipat. Masalah gizi (kegemukan atau obesitas) ini meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit berbahaya, misalnya diabetes dan penyakit kardiovaskular, seperti seranngan jantung dan stroke. (Lemhanas, 2023)

Kesehatan dan pendidikan jika dianalogikan seperti *hardware* dan *software*. Kesehatan merupakan *hardware* (kapasitas untuk menyerap; ibarat Pentium di komputer) sedangkan pendidikan adalah *software* (program). Tidak mungkin *software* dan program bisa dijalankan di komputer yang kapasitas memori, kecepatan, dan fiturnya tidak memadai. Dari awal para pendiri bangsa ini memang sudah menyadari betul arti penting pendidikan dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa. Hal itu tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai basis legitimasi dalam upaya perwujudan cita-cita kesetaraan, kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Daya saing Indonesia dalam sektor pendidikan dilihat dari indikator yang digunakan Programme for international Student Assessment (PISA) berada di level yang sangat memprihatinkan. PISA yang diinisiasi oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan di banyak negara. Pada tahun 2018, PISA di ikuti oleh 77 negara di seluruh dunia. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA sejak tahun 2000. Studi ini bersifat diagnostic, yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan di suatu negara. Pada 2018 diketahui nilai kompetensi literasi membaca Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara, menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Di antara lima negara di Asia Tenggara yang masuk OECD peringkat Indonesia hanya unggul atas Filipina yang berada di paling bawah diantara 77 negara. Sementara itu, Thailand berada di peringkat ke-66, Brunei Darussalam ke-59, Malaysia ke-56, dan Singapura di peringkat ke-2.

Data PISA 2018 menunjukkan kemampuan membaca sampai tingkat 2 siswa Indonesia hanya sekitar 30 persen, sedangkan rerata kompetisi membaca siswa di negara-negara OECD sudah mencapai 77 persen. Artinya, siswa Indonesia memiliki kesulitan untuk menginterpretasikan isi bacaan dengan naskah panjang. Untuk kemampuan matematika, hanya 28 persen siswa Indonesia yang mampu sampai kemahiran tingkat 2 atau lebih. Padahal rerata siswa di negara-negara OECD sudah mencapai 76 persen. Sementara untuk kemampuan sains hanya 40 persen siswa Indonesia mampu berada di tingkat kemahiran level 2, sedangkan rata-rata negara OECD mencapai 78 persen. Kemahiran di level 2 ini berarti siswa dapat mengenali penjelasan yang tepat tentang sebuah fenomena dan bisa mengidentifikasi dengan menggunakan pengetahuannya.

Laporan Bank Dunia tahun 2020 juga mengungkap beberapa kondisi pendidikan di Indonesia:

1. Pelajar Indonesia meski pergi ke sekolah selama 12,4 tahun tapi hanya belajar setara dengan 7,8 tahun.
2. Rendahnya investasi untuk perkembangan anak usia dini, hanya 2 persen dari jumlah anggaran di berbagai provinsi.
3. Adanya ketidaksetaraan dalam belajar. Meski ada peningkatan akses pendidikan, ketidakadilan dalam belajar tetap menjadi tantangan utama.
4. Ada tantangan di era industry 4.0 yang melahirkan perubahan dramatis, membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan (*upskill*) dan mengasah kembali keterampilan (*reskill*) para pekerja. (Lemhanas, 2023)

Sejalan dengan itu, Menurut Forum Ekonomi Dunia (WEF), ada dua keterampilan yang perlu di pelajari oleh anak-anak sebagai tolak ukur SDM Unggul. Pertama teknologi (*technology*) yakni *access to technology, can use it, can design it, can programme*, Kedua, keterampilan manusia antara lain; *be collaborative, be reflective thinkers, have the creativity muscles so that they can solve problem*. Rendahnya mutu pendidikan tercermin pula dari minimnya jumlah peneliti di negeri ini. Jumlah peneliti di Indonesia kalah jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura. bahkan Vietnam. Saat ini jumlah

peneliti di Indonesia hanya 1.071 per satu juta penduduk, Korea memiliki 8.000 peneliti per satu juta penduduk. Sementara itu, Singapura memiliki 6.658 peneliti per satu juta penduduk.

Menurut data Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan PBB UNESCO, jumlah peneliti di Indonesia paling bawah diantara anggota G-20. Tidak mengherankan jika, dalam setahun Indonesia hanya mampu menghasilkan 6.260 riset, sedangkan Malaysia 25.000 riset, Singapura 18.000 riset, dan Thailand 12.000-13.000 riset. Padahal anggaran riset Indonesia Rp. 27 triliun pertahun, lebih besar di banding Filipina yang Rp. 12 triliun, bahkan dengan Vietnam yang Rp. 24 triliun. Sering kali riset hanya sekedar penyerapan anggaran yang berorientasi kegiatan bukan bertujuan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pembangunan kependudukan, penduduk sebagai *human capital* dan *human resource* menjadi titik sentral. *Human capital* adalah gabungan antara pengetahuan dan *skill* seseorang yang dapat memberi nilai tambah dalam, pertumbuhan ekonomi. Human capital, memiliki beberapa unsur. (1) *capacity*, diukur dari pendidikan formal. (2) *development*, bagaimana seseorang mengembangkan keterampilan setelah lulus sekolah formal. (3) *know-how*, spesialisasi keterampilan pada dunia kerja. (4) *deployment*, pengaplikasian keterampilan pada dunia kerja. Dalam perkembangannya Indonesia masih terbentur minimnya lapangan pekerjaan, terlebih lagi lapangan pekerjaan menjadi isu sangat penting dan mendesak pada puncak bonus demografi. Selain itu, rendahnya kualitas SDM juga berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Rendahnya keterampilan SDM kita turut mendorong jumlah angka pengangguran.

Terlebih lagi, dunia sekarang telah memasuki era baru, dimana suatu era perubahan besar dan revolusioner terjadi hampir tiap 100 tahun sekali dalam sejarah manusia. Kita telah melewati tiga tahapan revolusi sebelumnya. Pada 1784, umat manusia mengalami Revolusi Industri 1.0, ditandai dengan penggunaan mesin uap oleh James Watt, yang mentransformasikan masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Revolusi Industri 2.0 yang juga dikenal dengan revolusi teknologi ditandai dengan penemuan tenaga listrik oleh Michael Faraday dan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison (1870) yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Adapun Revolusi Industri 3.0 pada 1969 ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Dan kini, kita tengah memasuki era Revolusi Industri 4.0 sebuah era dimana gelombang sejarah berputar begitu cepat, yang bertumpu pada *big data* dan kecerdasan buatan, yang pada saatnya semua hal akan menjadi cerdas dan tidak terbatas.

Setiap tahap revolusi menimbulkan konsekuensi pergerakan yang begitu cepat, teknologi dan manusia tidak bisa dipisahkan lag, hingga pada akhirnya perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Indonesia akan menikmati bonus demografi atau ledakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam rentang 2020-2030. Kondisi demografi Indonesia yang sangat potensial mengingat komposisi penduduknya didominasi penduduk usia produktif. Bonus demografi bisa menjadi peluang bagi bangsa ini apabila kita bisa mengambil manfaatnya dan juga, bisa menjadi petaka apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan Sonny Harry B. Harmadi, bonus demografi seharusnya dipersiapkan dari jauh-jauh hari, bukan seperti sekarang, mempersiapkan sesuatu yang sudah hadir. Indonesia terlambat dibandingkan Korea Selatan yang sudah menyiapkan diri dari jauh-jauh hari ketika tahu suatu saat struktur umur penduduknya berubah. Sebelum bonus demografi hadir, Korea Selatan sudah menyiapkan sekolah, lapangan kerja, dan pengembangan industri yang tepat. China juga menjadi contoh yang baik dalam menyambut bonus demografi.

Amartya Sen melihat bahwa manusia adalah *human agent* yang bisa melakukan perubahan di luar kepentingan dan kebutuhan sesaat atau di masa kini saja. Sehingga, kemampuan manusia dalam membangun suatu alasan melalui pikirannya menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kemanusiaan pada umumnya. Oleh karena itu, keberlanjutan eksistensi kehidupan, negara, bangsa dan kemanusiaan bergantung pada bagaimana kita menghadapi masa depan. Lemhannas dalam buku *Indonesia menuju 2045* menjelaskan bahwa, kualitas manusia Indonesia yang menjadi modal kemajuan harus berkarakter kuat dengan ciri-ciri: (1) Punya rasa ingin tahu (Curiosity), (2) Percaya diri, tidak minder dan tidak pula arogan. (3) berani ambil resiko, tidak mudah terpengaruh, tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu tanpa pemikiran matang. (4) Berpikir kritis dan kreatif. (5) Berani mempelajari hal-hal baru. (6) Mengajukan opini yang tajam dan persuasif baik dalam bicara maupun dalam menulis.

Para pendiri bangsa sejatinya menyadari arti penting pembangunan karakter-mental. sebagaimana pribahasa Inggris menyebutkan, "*when wealth is lost, nothing is lost; when health is lost,*

something is lost; when character lost, everything is lost.” (jika harta kita hilang, maka tidak ada yang hilang. Jika kesehatan kita hilang, maka ada sesuatu yang hilang, tetapi jika karakter kita hilang, maka kita akan kehilangan segala-galanya). Sebab warisan dari kolonialisme, imperialisme, feodalisme tidak hanya terletak pada kekayaan yang dirampas, melainkan pewarisan nilai-nilai penindasan, perbudakan yang tertanam dalam mental-karakter bangsa.

Bung Karno sangat menekankan perlunya *nation and character building*. Dalam Amanat Presiden pada Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1956, dalam suasana limbung politik pasca-Pemilu 1955, Bung Karno menjelaskan tiga fase revolusi bangsa. Dua fase telah dilalui secara berhasil, dan satu fase lagi mengadang sebagai tantangan. Indonesia telah melewati “taraf physical revolution” (1945-1949) dan “taraf survival” (1950-1955). Lantas ia tandaskan, “Sekarang kita berada pada taraf *investment*, yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya: *investment of human skill, material investment, dan mental investment.*”

Dalam pandangan Bung Karno, investasi keterampilan dan materi amat penting. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah investasi karakter mental. Investasi keterampilan dan materi tidak bisa menjadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa didasari investasi mental-karakter. Tanpa kekayaan mental, upaya-upaya pemupukan keterampilan dan materi hanya akan melanggengkan perbudakan. Dikatan Bung Karno, “Lebih baik kita membuka hutan kita dan menggaruk tanah kita dengan sepuluh jari dan kuku kita ini daripada menjual serambut pun daripada kemerdekaan kita ini untuk dolar, untuk rubel.” Ditambahkannya pula, “Mental kita harus mengangkat diri kita di atas kekecila jiwa, yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran mempertentangkan urusan tetek bengek yang tidak penting.”

Oleh sebab itulah, mengapa Bung Karno begitu menekankan perlunya “*Nation and Character Building.*” Dalam pandangannya, Indonesia adalah bangsa besar, namun sering kali memberi nilai yang terlalu rendah pada bangsanya alias bermental kecil; masih belum bebas dari mental kaum terjajah yang sering mengidap perasaan rendah diri (*minderwaardigheids complex*). Bung Karno menyadari bahwa sebagai akibat penjajahan dan feodalisme selama ratusan tahun, terbentuklah karakter rakyat yang disebut “abdikrat”, meminjam istilah dari Verhaar dalam bukunya Identitas Manusia. Akibatnya, terbentuklah mentalitas pecundang dengan penuh perasaan tak berdaya dan tidak memiliki kepercayaan diri atau *self-confidence*. Memasuki alam kemerdekaan, Bung Karno menyerukan agar watak demikian harus dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka dan berani berkata “ini dadaku, mana dadamu”; berani mandiri dan menghargai diri sendiri.

Pembangunan mental-karakter sejatinya harus menumbuhkan mentalitas karakter manusia Indonesia yang mandiri, percaya diri dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, berani berfikir dan bersikap. Sebab SDM Indonesia yang unggul akan menghasilkan kemakmuran, kesejahteraan. Negara Indonesia didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, Bahkan Bung Karno mengatakan untuk seribu windu lamanya. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran bersama bahwa Indonesia harus menjadi negara besar, bangsa yang maju dan tetap eksis dengan kunci keberlangsungannya terletak pada kekuatan manusia-manusianya yang percaya pada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Pemerataan dan Keadilan Pembangunan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi nasional yang begitu luar biasa. Secara geopolitik seperti pernah dikatakan oleh Bung Karno, “Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau (*Archipelago*)” letak Indonesia berada pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudrea. Sebuah negara bangsa yang mengikat lebih dari 500 ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau) dengan sekitar 6.000 diantaranya berpenduduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003). Lautan menjadi faktor dominan. Dari 7,9 juta kilometer persegi total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta kilometer persegi merupakan wilayah laut teritorial dan 2,9 juta kilometer persegi perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan sisanya sebanyak 1,8 juta kilometer persegi merupakan daratan. Dengan demikian luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total wilayah Indonesia. (Latif, Yudi. 2020)

Dengan panjang pantai 95.180,8 kilometer, sementara panjang khatulistiwa 40.070 kilometer, maka panjang pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan Eropa tampak jelas sifat kebaharian Indonesia. Diatas

peta Amerika Serikat, Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat sampai Laut Atlantik di timur; sementara di atas peta Eropa, Indonesia membentang dari London di barat sampai Laut Kaspia di timur. Luas Indonesia dengan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Bedanya, Indonesia terdiri atas ribuan pulau di sebuah wilayah laut yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan.

Tidak hanya dianugerahi oleh SDM yang melimpah, Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Tingginya biodiversitas ditunjukkan dengan adanya 10 persen tanaman yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, juga 12 persen dari mamalia, 16 persen dari hewan reptil, 17 persen dari burung, 18 persen dari jenis terumbu karang, dan 25 persen dari hewan laut. Berdasarkan Protokol Nayoga, potensi SDA ini bisa menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (*green economy*). Selain itu, Indonesia tergolong sebagai negara tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi, juga dikenal sebagai negara rawan bencana karena wilayahnya dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu; lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Namun, kenyataannya faktor geologi tersebut memberikan keuntungan berupa kekayaan mineral yang melimpah.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian sangat relevan jika kita melihat sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadi negara yang besar dan bersaing dengan negara maju lainnya asalkan bangsa ini memiliki 'rute' arah yang jelas untuk mencapai Indonesia Raya, negara yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Bung Karno pun mengatakan, "Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari Rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkekorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan terakhir dari revolusi kita."

Maka, untuk mencapai cita-cita tersebut, di perlukan rute, arah dalam pengelolaan negara yang di dasarkan pada kebutuhan Indonesia, bukan rute, arah negara lain. Pasalnya, cara berjuang Indonesia pasti tidak sama dengan negara-negara lain yang memiliki geopolitik yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Hal itu sejalan dengan konsepsi geopolitik Bung Karno, "Mempertahankan Indonesia adalah lain dari pada mempertahankan Tiongkok. Mempertahankan Indonesia lain dari pada mempertahankan India, ... Jerman, ... Amerika. Tiap-tiap pertahanan jikalau mau efektif harus satu pertahanan yang bersendi, berurat nadi kepada keadaan-keadaan nyata dari tanah airnya dan kepada bangsanya".

Indonesia perlu visi pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dengan melihat potensi yang dimiliki berdasar kondisi geopolitik yang ada. Maka, skema dalam mengelola negara yang berkelanjutan sangat diperlukan. Dalam Amanat Pembangunan Nasional Semesta Berencana pada 28 Agustus 1959 Bung Karno mengatakan, "kita harus mengadakan *planned policy*". Pembangunan Nasional Semesta Berencana tersebut bersifat "overall planning", *planning* semesta, *planning* yang meliputi semua bidang, *planning* yang mengenai ja ekonomi, ja kulturil, ja mental, *planning* diatas segala bidang" Jadi tujuan pembangunan semesta menurut bung karno adalah membangun masyarakat adil dan makmur; adil dan makmur menurut tinjauan pancasila. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, pembangunan haruslah terencana, bukan sporadis tanpa arah. Bung Karno dalam pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita, 17 Agustus 1959 menjelaskan bahwa "*Planning is the technique of foreseeing-ahead every step in a long series of separate operations* (Perencanaan adalah teknik untuk telah melihat lebih dahulu setiap langkah yang harus diambil, dalam satu rentetan-panjang dari tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri)."

Karena itu, diperlukan pola pembangunan bagi bangsa Indonesia yang terencana, bervisi nasional, semesta, dan berkesinambungan. Telah banyak negara yang mewujudkan rencana pembangunan lima tahun seperti, China, India dan Thailand. Mereka adalah negara yang berhasil mengandalkan visi dan garis besar pembangunan. India saat ini sudah memasuki Repelita 12 yang ingin mentransformasi negeri ini kedalam negara maju, Thailand kini memasuki repelita ke 12, mereka memfokuskan pada pembangunan SDM, mendukung riset dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi dan nilai tambah produk memperbaiki angkatan kerja, meningkatkan daya saing UKM dan mendukung gerakan ekonomi digital.

China, memasuki Repelita 13. Negeri ini mencanangkan target untuk menyamai Jepang pada 2025. Menjadi negara maju secara relative pada 2050 , serta menyamai AS pada 2080 dan menjadi

negara adidaya yang menggantikan AS pada 2100. Sumber kekuatan ekonomi China tidak hanya dari segi teknis, tapi juga dari segi warganya yang memiliki kecintaan pada produk sendiri. Inilah modal dasar bagi China yang kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru, penantang hegemoni AS.

Arah pembangunan Indonesia, mengacu pada visi dan misi Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam RJPM dan RPJP yang dibuat pemerintah dengan DPR. Selama periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo menjalankan gagasan Trisakti Bung Karno yakni, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, yang kemudian di prioritaskan ke dalam Sembilan program utama yang disebut dengan Nawacita. Kesembilan program gagasan Nawacita tersebut ingin menciptakan ruang gerak yang sama untuk semua warga negara di mana pun mereka berada. Melalui ekonomi berkeadilan, semua warga bisa merasakan pembangunan infrastruktur sebagai hasil dari dialektika pembangunan. Dalam visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia, dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan, didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah, yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, semakin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. Letak geografis Indonesia dengan luas wilayahnya yang 75 persen dikelilingi laut, dengan 17.440 pulau, menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini dalam hal konektivitas antarwilayah. Sebagaimana tertuang dalam PJP 2005-2025 mengenai visi pembangunan infrastruktur, terwujudnya infrastruktur diharapkan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Pembangunan infrastruktur dirasa penting bukan semata untuk mengatasi ketertinggalan, melainkan juga untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dan memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah. Itulah sebabnya, pembangunan nasional tidak hanya bersifat Jawa-sentris, tetapi juga Indonesia-sentris. Pembangunan infrastruktur yang merata akan mempercepat konektivitas budaya yang dapat mempertautkan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara.

Selain pemerataan di bidang pembangunan infrastruktur, perlu juga pemerataan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua bidang tersebut menjadi faktor penentu berkualitas tidaknya SDM yang dimiliki bangsa ini. Di bidang kesehatan, misalnya, rasio dokter di Indonesia adalah 4,27 per 10.000 penduduk, dokter spesialis 1,46 per 10.000 penduduk. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyatakan, Indonesia menghadapi ancaman kekurangan 100.000 dokter pada 2030. Apabila kita belajar dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, permasalahan di bidang kesehatan, terutama pada masa pandemi Covid-19, ialah terbatasnya kapasitas rumah sakit. Perlu kita ingat bahwa rumah sakit tidak hanya merawat pasien Covid-19, tetapi juga merawat pasien yang menderita penyakit lain.

Kondisi *bed to population ratio* Indonesia mash jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. India, umpamanya, memiliki *bed to population ratio* 2,71:1.000 atau 2,71 tempat tidur di rumah sakit per 1.000 jiwa. Padahal, dari segi jumlah populasi, India memiliki 1,3 miliar penduduk atau enam kali lipat dari Indonesia. China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa, memiliki rasio 4,34:1.000, atau 4,34 tempat tidur per 1.000 penduduk. Jepang menjadi negara dengan rasio tertinggi, yakni 13:1.000, disusul Korea Selatan 12:1.000. Selain kekurangan jumlah tempat tidur perawatan, persebaran tempat tidur juga tidak merata. Di DKI Jakarta, rasionya di atas rasio nasional, yaitu 2:1.000 atau 2 tempat tidur per 1.000 penduduk. Namun, di daerah lain, terutama di Indonesia bagian timur, sangat kekurangan.

Dalam menyusun pembangunan nasional, bangsa ini harus memiliki rute yang jelas agar tidak kehilangan arah. Terlebih lagi Indonesia pada tahun 2045 genap berusia 100 tahun. Rute, arah, tersebut harus sesuai dengan akar sejarah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Diperlukan pemahaman dan kesadaran kolektif dengan melihat potensi yang dimiliki bangsa ini berdasarkan pada geopolitik yang ada. Bung Karno menyampaikan, jika tidak lagi peka dan memahami potensi besar geopolitiknya, manusia Indonesia akan tetap jatuh menjadi bangsa kuli, yang menjadikuli di antara bangsa-bangsa.



Penutup

Dalam menyusun pembangunan nasional serta menepati janji kemerdekaannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi negara besar dalam kancah persaingan global saat ini, Indonesia membutuhkan rute, arah yang dilalui secara tepat sehingga tidak salah arah, salah jalan dan salah mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Terlalu mubazir jika melihat dari sisi geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi, Indonesia tidak memiliki kekurangan, bahkan yang kita miliki hampir sempurna dan ada di Nusantara. Akan tetapi, melihat hari ini, bangsa ini masih disibukkan oleh belum selesainya masalah faktor sejarah, berdebat mengenai kesepakatan bernegara, dan masih dalam suasana euforia demokrasi. Maka, sepanjang ketiga hal tersebut belum diselesaikan secara dewasa, duduk bersama dengan menghargai semua perbedaan yang ada, janganlah berekspektasi terlalu tinggi untuk menjadi negara yang bisa menepati janji kemerdekaan Indonesia, yaitu sejahtera, adil, makmur, aman dan sentosa. Jadi, dalam pembangunan nasional jangan sampai hanya bermodalkan keberanian tanpa visi, kemudian asal berjalan dengan kondisi tidak memahami rutenya maka dipastikan perjalanan tersebut tidak akan mencapai tujuannya.

Rute Indonesia Raya, dalam menepati janji kemerdekaannya. *Pertama*, kesadaran akan potensi dan keadaan wilayah yang dimiliki Indonesia. *Kedua*, kesepakatan dalam bernegara sebagai acuan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. *Ketiga*, sinergi dalam pembangunan bangsa, yaitu pembangunan peradaban bangsa, pembangunan SDM unggul, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Itulah rute bagi Indonesia yang saat ini belum dilalui dengan baik. Terlebih lagi Indonesia pada tahun 2045 genap berusia 100 tahun. Menjadi negara besar, maju, dengan daya saing tinggi dan dihitung sebagai salah satu kekuatan global negara di dunia, bagi Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang akan menemui kenyataan.

Untuk itu, rute, arah, tersebut harus sesuai dengan akar sejarah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Diperlukan pemahaman dan kesadaran kolektif dengan melihat potensi yang dimiliki bangsa ini berdasarkan pada geopolitik yang ada. Hal menarik disampaikan oleh Bung Karno. Katanya, Jangan melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Cindy. *Soekarno: Penyambung Lidah Rakyat*. Yayasan Bung Karno 2011.
 Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1971
 Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2015.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi pancasila*. PT: Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2012.
- Latif, Yudi. *Pendidikan yang Berkebudayaan; Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. PT: Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2020.
- Lemhannas. *Indonesia Menuju 2045*. Penerbit Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2021.
- Mulyana, S. *Sriwijaya*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Robert Dick-Read, dalam *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times* (2005). Edisi Indonesianya diterbitkan oleh Mizan, *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika* (2008).
- Soepandji. Kris Wijoyo. *Ilmu Negara perspektif Geopolitik masa kini*. Badan Penerbit UI, Jakarta, 2017.
- Toer, Pram Ananta. *Arus Balik*. Kuala Lumpur: Wira Karya
- Yuhana, Abdy. *Rute Indonesia Raya*. Penerbit Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2023.
- I Basis Susilo. Urgensi GBHN di Era Reformasi, Kompas, 23 Januari 2016
- Mochdar Soleman dan Mohammad Noer dalam Jurnal Politik Vol 13, No.1. 2017.
- Yuhana, Abdy. Visi Negara Pancasila. Pikiran Rakyat, 3 Juni 2017

How to Cite

"RUTE INDONESIA RAYA", *JP Nasional*, vol. 1, no. 1, Aug. 2024, Accessed: Aug. 16, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/4>

License

Copyright (c) 2024 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).